

TINJAUAN YURIDIS PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA TERHADAP
PEKERJA YANG DILAKUKAN PERUSAHAAN AKIBAT PANDEMI
COVID-19 DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR
11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA

Oleh
Nabila Nurita¹ dan Ari Hernawan²

INTISARI

Penelitian tesis ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis dapat tidaknya Pandemi Covid-19 sebagai alasan pemutusan hubungan kerja dapat dikategorikan sebagai *Force majeure* dan untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum preventif yang diatur Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 terhadap pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja akibat adanya pandemi Covid-19.

Penelitian tesis ini merupakan penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif. Penelitian dilakukan melalui penelitian kepustakaan atas berbagai bahan hukum baik primer, sekunder maupun tersier dengan cara studi dokumen. Penelitian didukung dengan wawancara terhadap narasumber menggunakan alat berupa pedoman wawancara. Data hasil penelitian dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan pertama, pandemi Covid-19 sebagai alasan pemutusan hubungan kerja tidak dapat dikategorikan sebagai *force majeure*, karena tidak memenuhi unsur-unsur *force majeure* yang ada dalam KUHPdata, sehingga hal ini tidak menghapuskan kewajiban pengusaha untuk membayarkan hak pekerja sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Kedua, perlindungan hukum preventif terhadap pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja akibat adanya pandemi Covid-19 telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yaitu Pasal 156 ayat (1) namun apabila melihat dari ketentuan di Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, hal ini lebih memberikan perlindungan hukum preventif terhadap pekerja apabila terjadi pemutusan hubungan kerja karena besaran pesangon yang diterima pekerja lebih banyak.

Kata Kunci: Pemutusan Hubungan Kerja, Covid-19, *Force majeure*, Cipta Kerja

¹ Mahasiswa MIH Kampus Jakarta, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

² Dosen MIH Kampus Jakarta, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

*JURIDICAL REVIEW OF TERMINATION OF WORKERS RELATIONSHIP
BY COMPANIES DUE TO COVID-19 PANDEMIC IN TERM OF LAW
NUMBER 11 OF 2020 CONCERNING JOB CREATION*

By
Nabila Nurita³ & Ari Hernawan⁴

ABSTRACT

This thesis research aims to determine and analyze whether or not the Covid-19 Pandemic as a reason for work termination can be categorized as force majeure and to find out and analyze preventive legal protection regulated by Law Number 11 Year 2020 for workers who have been terminated due to the Covid-19 pandemic.

This thesis research is a descriptive normative juridical research. The research was conducted through library research on various legal materials, both primary, secondary and tertiary by means of document studies. The research was supported by interviews with informants using a tool in the form of interview guidelines. The research data were analyzed qualitatively.

The results of the study show that first, the Covid-19 pandemic as the reason for work termination cannot be categorized as force majeure, because it does not meet the elements of force majeure contained in the Civil Code, so it does not eliminate the obligation of employers to pay workers' rights according to Law Number 11 Year 2020 on Job Creation. Second, preventive legal protection to work termination due to the pandemic Covid-19 has been regulated in Law Number 11 Year 2020 in Article 156 (1), however viewed from the provisions of Law Number 13 of 2003 provides more preventive legal protection for workers in the event of work termination because the amount of severance pay received by workers is higher.

Keywords: *Work Termination, Covid-19, Force Majeur, Job Creation*

³ Student of MIH Jakarta Campus, Faculty of Law, Gadjah Mada University, Jakarta

⁴ Lecturer of MIH Jakarta Campus, Faculty of Law, Gadjah Mada University, Yogyakarta.